

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KAB. KULON PROGO**

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur daerah. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

W a t e s, Januari 2018

Kepala Dinas,

Ir. GUSDI HARTONO, MT
NIP 19650806 199303 1004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo disusun dengan tujuan memberikan gambaran kongkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam rencana kerja Tahun 2018. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program-kegiatan berikut realisasinya.

Pencapaian realisasi sasaran program dan kegiatan meningkat dari tahun sebelumnya dan telah mencapai target Hal ini didukung oleh ketersediaan anggaran dan Sumber daya manusia yang berkompeten dan juga didukung oleh semua stakeholder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

I. Meningkatnya infrastruktur jalan

Capaian Kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2018 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 76,36%. Hal ini karena didukung oleh semua stakeholder dan ketersediaan anggaran yang ada. Dengan capaian realisasi keuangan sebesar 96.50% ini sudah dapat memenuhi target kinerja program 100% sehingga efisiensi anggaran dapat terlaksana

II. Persentase ketersediaan sumber daya air

Capaian peningkatan pelayanan irigasi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 sebesar 82,44 % telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 80,87 %. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian peningkatan pelayanan irigasi adalah ketersediaan anggaran dalam memperbaiki sarana-sarana irigasi serta adanya kegiatan cetak sawah baru seluas 55 hektar

III. Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik

Capaian Kinerja Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Kantor dalam kondisi baik di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 mencapai 91,45 % sudah sesuai dari yang ditargetkan sebesar 91,45 % Salah satu faktor terpenuhinya target kinerja sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik disebabkan karena kebutuhan

untuk perbaikan gedung serta adanya skala prioritas pembangunan dan perbaikan gedung-gedung pemerintah dan didukung oleh ketersediaan anggaran.

IV. Capaian lingkungan sehat permukiman dan perumahan

Capaian kinerja peningkatan pelayanan perumahan dan kawasan permukiman pada tahun 2018 adalah sebesar 47,52 % telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 42,01 %. Keberhasilan dalam capaian target yang telah ditetapkan dikarenakan pemerintah daerah Kulon Progo telah melaksanakan program pengembangan perumahan secara berkelanjutan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu pembangunan fasilitas lingkungan rusunawa dan pemberdayaan peningkatan infrastruktur oleh komunitas. Pada tahun 2018 kegiatan pendampingan perumahan swadaya di kelurahan/desa meliputi kegiatan fisik berupa peningkatan kualitas prasarana dan sarana lingkungan, dan bantuan perumahan swadaya melalui dana DAK dan BKK, dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang. Angka capaian peningkatan kawasan lingkungan sehat permukiman didapat dari kekurangan dalam menambah jumlah permukiman tidak kumuh di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Serta kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk tidak membangun bangunan di tempat kumuh seperti di bantaran sungai maupun membangun bangunan di sempadan jalan maupun perlintasan kereta api.

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya telah harus menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Strategis (Renstra). Demikian pula Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah telah juga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2017– 2022. Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai tujuan pembangunan daerah pada sesuai dengan misi keempat yaitu Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas”.

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 ditetapkan sebanyak 4 (empat) Tujuan dan 6 (enam) Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya didukung dengan 10 (Dua belas) Program dengan 36 (Tiga puluh enam) Kegiatan yang harus dicapai. Sasaran

Strategis tersebut diwujudkan melalui kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.

Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2017-2022 adalah :
1) Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, 2) meningkatnya pelayanan Sumber Daya Air, 3) Ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan yang memadai , 4) Meningkatnya lingkungan sehat permukiman dan perumahan, Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 4 (empat) sasaran dan indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.

Sedangkan untuk penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 151.492.267.625 , realisasi sebesar Rp 146.647.504.856,35 atau sebesar 96,80%

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Iktisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	7
I.1 Dasar Hukum	7
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	7
I.3 Isu Strategis dan Permasalahan	8
BAB II Perencanaan Kinerja	9
II.1 Visi dan Misi	9
II.2 Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan	10
II.3. Penetapan Kinerja dan RKT	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja	14
III.1 Pengukuran Capaian Kinerja	14
III.2 Analisis Capaian Kinerja	16
III.3 Akuntabilitas Keuangan	25
III.3 Permasalahan dan Solusi	27
III.4 Analisis Efisiensi Sumberdaya	27
III.5 Analisis Efisiensi Keuangan	30
III.6 Kondisi Sarana Dan Prasarana	30
BAB IV Penutup	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo di bidang pekerjaan umum yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Pekerjaan Umum dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Peraturan daerah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan bina marga;
- b. menyelenggarakan kegiatan cipta karya;
- c. menyelenggarakan kegiatan sumber daya air ;
- d. menyelenggarakan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- e. melaksanakan kegiatan kesekretariatan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Daerah No 54 Tahun 2016, dapat dilihat pada lampiran dibawah ini.

I.3 Issu strategis dan berbagai permasalahan

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo, Hasil telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas PUP-ESDM DIY, serta Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012 sampai dengan 2032 Pemerintah Kabupaten Kulon progo, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

- Pembangunan bandara internasional NYIA (New Yogyakarta International Airport).
- Jalur Bedah Menoreh sebagai pendukung KSPN Borobudur.
- Pembangunan infrastruktur Kawasan Relokasi Bandara NYIA (New Yogyakarta International Airport) dan disekitar bandara.
- Pemulihan jaringan irigasi di daerah terdampak bandara.
- Pembangunan sarana prasarana Infrastuktur Kota Wates dan kawasan Aerotropolis.
- Penanganan banjir wilayah selatan Kabupaten Kulon Progo

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Visi dan Misi

Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo mengacu dari visi dan misi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022, yaitu:

“Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya;
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram;
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-4, yaitu “Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas”.

II.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan dari apa yang telah dirumuskan tersebut, maka ditentukan Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana berikut :

Tabel 1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Visi : “Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”			
Misi IV : 4.”Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah	1.Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	1. Peningkatan kondisi Jalan dalam kondisi baik	1.Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
		2. Peningkatan pelayanan Sumber Daya Air.	2.1. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) untuk pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. 2.2. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) sesuai prioritas kebutuhan yang mendesak. 2.3. Melaksanakan konservasi Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan skala prioritas.
		3. Peningkatan Kondisi Gedung Pemerintah	3.1. Melaksanakan peningkatan pembangunan Gedung Pemerintah, Pembinaan Jasa Konstruksi dan Air Bersih Sanitasi secara efektif dan efisien

Visi : “Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

Misi IV : 4.”Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas”

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Ketersediaan lingkungan sehat permukiman dan perumahan	<p>dengan berdasarkan skala prioritas.</p> <p>4.1. Melaksanakan Penyusunan database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pengurangan Jumlah RTLH dan Backlog.</p> <p>4.2. Melaksanakan Inventarisasi database Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Pemukiman, Penuntasan Kawasan kumuh, Pembangunan PSU dan Pengelolaan Pemeliharaan PSU Pemukiman yang menjadi asset pemda.</p>
	2.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	5. Peningkatan pelayanan limbah dan Persampahan	<p>5.1. Melaksanakan pelayanan limbah dan persampahan sesuai dengan jangkauan pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup.</p> <p>5.2. Melaksanakan peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.</p>
		6. Peningkatan Ketersediaan Taman.	<p>6.1. Melaksanakan peningkatan ketersediaan taman untuk mendukung kualitas lingkungan hidup.</p> <p>6.2. Melaksanakan pemeliharaan Taman secara berkelanjutan</p>

II.2 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan juga merupakan aspek operasional nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran :

Perjanjian Kinerja tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

**RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2018**

Sasaran IKU SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan Infrastruktur yang mendukung Performa wilayah	Capaian panjang jalan penghubung antar wilayah dalam kondisi baik	Persen	78,81
		Indeks ketersediaan sumber daya air	Persen	82,71
		Cakupan gedung perkantoran pemerintah dan PSU perkotaan kondisi baik	Persen	77,54
		Cakupan lingkungan sehat permukiman dan perumahan	Persen	54,65

Sasaran Program SKPD

No	Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Program	Satuan	target
1	Meningkatnya infrastruktur jalan	Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	76,36
		Capaian uji laboratorium dan alat berat	Persen	81,25
2	Meningkatnya pelayanan sumber daya air	Capaian ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik	Persen	80,87
3	Ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan yang memadai	Cakupan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persen	91,45
		Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi	Persen	74,58
4	Meningkatnya	Capaian layanan air bersih dan air	Persen	67,29

No	Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Program	Satuan	target
	penataan lingkungan permukiman dan perkotaan	limbah		
Capaian peningkatan pelayanan perumahan dan peningkatan kawasan lingkungan sehat permukiman		Persen	42,01	
Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan		Persen	87,29	
Capaian taman dalam kondisi baik, layanan persampahan		Persen	68,14	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2018

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk *input* meliputi :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Dana baik DAU mapupun DAK yang terdiri dari :
 - a) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung.
 - b) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung.

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 6 berikut ini:

Pengukuran Kinerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya infrastruktur jalan	Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	$(\text{Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik} / \text{jumlah panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$	Persen	76,36	76,36	100
		Capaian uji laboratorium dan alat berat	$((\text{Jumlah permohonan uji laboratorium yang ditangani} / \text{Jumlah permohonan uji laboratorium} \times 100\%) + (\text{Jumlah alat berat dalam kondisi baik (berfungsi)} / \text{jumlah alat berat} \times 100\%)) / 2$	Persen	81,25	81,25	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya pelayanan sumber daya air	Capaian ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik	$((\text{Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik} / \text{jumlah panjang irigasi} \times 100\%) + (\text{jumlah luas areal yang dilayani irigasi} / \text{jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi} \times 100\%) + (\text{jumlah kelembagaan petani pengelola air yang diberdayakan} / \text{jumlah kelembagaan petani pengelola air yang seharusnya ada} \times 100\%) + (\text{Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik} / \text{jumlah panjang drainase} \times 100\%) + (\text{Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani} / \text{jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun)} \times 100\%)) / 5$	Persen	80,87	82,44	101,94
3	Ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan yang memadai	Capaian gedung pemerintah dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik / jumlah gedung kantor x 100%	Persen	91,45	91,45	100
		Capaian peningkatan kualitas jasa konstruksi	Jumlah badan usaha konstruksi yang memenuhi ketentuan / jumlah badan usaha konstruksi x 100 %	Persen	74,58	74,58	100
4	Meningkatnya penataan lingkungan permukiman dan perkotaan	Capaian layanan air bersih dan air limbah	$((\text{Jumlah rumah tangga berakses air bersih} / \text{Jumlah rumah tangga} \times 100\%) + (\text{Jumlah rumah tangga berakses air limbah} / \text{jumlah rumah tanggax}100\%)) / 2$	Persen	67,29	87,80	130,48
		Capaian peningkatan pelayanan perumahan dan peningkatan kawasan lingkungan sehat permukiman	$((\text{Jumlah rumah layak huni} / \text{jumlah seluruh rumah} \times 100\%) + (\text{Luas permukiman kumuh yang ditangani} / (\text{luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani} \times 100\%)) / 2$	Persen	42,01	47,52	113,30
		Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan	$((\text{Jumlah panjang jalan perkotaan bertrottoar} / \text{Jumlah panjang jalan perkotaan}) \times 100\%) + ((\text{Jumlah panjang jalan perkotaan berdrainase} / \text{Jumlah panjang jalan perkotaan}) \times 100\%) / 2$	Persen	92,90	92,90	100
		Capaian taman dalam kondisi baik, layanan persampahan	$((\text{Jumlah sampah yang tertangani} / \text{Jumlah produksi sampah} \times 100\%) + (\text{Jumlah taman dalam kondisi baik} / \text{jumlah keseluruhan Taman} \times 100\%)) / 2$	Persen	68,14	68,14	100

2. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan pada Tabel hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 secara rinci capaian masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2018 Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran strategi OPD I Meningkatnya infrastruktur jalan

a. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

No	Indikator Kinerja	Formula pengukuran	Satuan	Realisasi 2017	Tahun 2018		Persen
					Target	Realisasi	
1	Capaian panjang jalan penghubung antar wilayah kondisi baik	$(\text{Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik} / \text{jumlah panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$	%	74,63	76,36	76,36	100

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

No	Indikator Kinerja	Formula pengukuran	Satuan	Realisasi 2017	Tahun 2018		Persen
					Target	Realisasi	
1	Capaian uji laboratorium dan alat berat	$((\text{Jumlah permohonan uji laboratorium yang ditangani} / \text{Jumlah permohonan uji laboratorium} \times 100\%) + (\text{Jumlah alat berat dalam kondisi baik (berfungsi)} / \text{jumlah alat berat} \times 100\%)) / 2$	%	78,57	81,25	81,25	100

Sasaran Strategis OPD 2 Meningkatnya pelayanan sumber daya air

Program Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air

No	Indikator Kinerja	Formula pengukuran	Satuan	Realisasi 2017	Tahun 2018		Persen
					Target	Realisasi	
1	Persentase ketersediaan sumber daya air	$((\text{Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik} / \text{jumlah panjang irigasi} \times 100\%) + (\text{jumlah luas areal yang dilayani irigasi} / \text{jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi} \times 100\%) + (\text{jumlah}$	%	78,57	80,87	82,44	101,94

		kelembagaan petani pengelola air yang diberdayakan/ jumlah kelembagaan petani pengelola air yang seharusnya ada x100%)+(Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik/jumlah panjang drainase x 100%)+(Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani/jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun x 100%))/5					
--	--	---	--	--	--	--	--

Sasaran Strategis OPD 3 Ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan yang memadai.

- a. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum

No	Indikator Kinerja	Formula pengukuran	Satuan	Realisasi 2017	Tahun 2018		Persen
					Target	Realisasi	
1	Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik/jumlah gedung kantor x 100%	%	73,08	91,45	91,45	100

- b. Program Pembinaan dan Pengendalian Jasa Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Formula pengukuran	Satuan	Realisasi 2017	Tahun 2018		Persen
					Target	Realisasi	
1	Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi	Jumlah badan usaha konstruksi yang memenuhi ketentuan/jumlah badan usaha konstruksi x 100 %	%	74,58	74,58	74,58	100

Sasaran Strategis OPD 4. Meningkatnya penataan lingkungan permukiman dan perkotaan

- a. Program Pembangunan Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi

No	Indikator Kinerja	Formula pengukuran	Satuan	Realisasi 2017	Tahun 2018		Persen
					Target	Realisasi	
1	Capaian layanan air bersih dan air limbah	((Jumlah rumah tangga berakses air bersih/Jumlah rumah tangga x 100%) + (Jumlah rumah tangga berakses air limbah/jumlah rumah tanggax100%))/2	%	66,8	67,29	87,70	130,48

b. Program Lingkungan Sehat Permukiman dan Pengembangan Perumahan

No	Indikator Kinerja	Formula pengukuran	Satuan	Realisasi 2017	Tahun 2018		Persen
					Target	Realisasi	
1	Capaian peningkatan pelayanan perumahan dan peningkatan kawasan lingkungan sehat permukiman	$((\text{Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah} \times 100\%) + (\text{Luas permukiman kumuh yang ditangani}/(\text{luas permukiman kumuh yang seharusnya ditangani} \times 100\%))/2$	%	41,84	42,01	47.52	113,30

c. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

No	Indikator Kinerja	Formula pengukuran	Satuan	Realisasi 2017	Tahun 2018		Persen
					Target	Realisasi	
1	Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan	$((\text{Jumlah panjang jalan perkotaan bertrottoar} / \text{Jumlah panjang jalan perkotaan}) \times 100\%) + ((\text{Jumlah panjang jalan perkotaan berdrainase}/\text{Jumlah panjang jalan perkotaan}) \times 100\%) / 2$	%	87,18	92.01	92,01	105,40

d. Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

No	Indikator Kinerja	Formula pengukuran	Satuan	Realisasi 2017	Tahun 2018		Persen
					Target	Realisasi	
1	Capaian taman dalam kondisi baik, layanan persampahan	$((\text{Jumlah sampah yang tertangani}/\text{Jumlah produksi sampah} \times 100\%) + (\text{Jumlah taman dalam kondisi baik} / \text{jumlah keseluruhan Taman} \times 100\%))/2$	%	67,66	68,14	68,14	100

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan RPJM dalam dokumen Perencanaan Strategis

Sasaran strategis I Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan

e. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Target Akhir renstra 2022	% Capaian 2018 terhadap target akhir 2022
				2017	2018		
1	Capaian panjang jalan penghubung antar wilayah kondisi baik	(Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / jumlah panjang jalan kabupaten)x100%	%	74,65	76,36	82,59	92,45

Tahun 2018 Angka realisasi diatas didapat dari Jumlah panjang Lokal Primer I dan Lokal Primer II dalam kondisi baik (km) sebanyak 1.527,29 dibagi dengan Jumlah panjang jalan Lokal Primer I dan Lokal Primer II (km) sebanyak 2.000,64

Capaian Kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2018 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 76,36%. Hal ini karena didukung oleh semua stakeholder dan ketersediaan anggaran yang ada. Dengan capaian realisasi keuangan sebesar 96.50% ini sudah dapat memenuhi target kinerja program 100% sehingga efisiensi anggaran dapat terlaksana

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Target Akhir renstra 2022	% Capaian 2018 terhadap target akhir 2022
				2017	2018		
1	Capaian uji laboratorium dan alat berat	((Jumlah permohonan uji laboratorium yang ditangani/ Jumlah permohonan uji laboratorium x 100%) + (Jumlah alat berat dalam kondisi baik (berfungsi)/jumlah alat beratx100%))/2	%	78.57	81,25	81,25	100

Tahun 2018 Angka realisasi capaian berasal dari : Jumlah permohonan uji laboratorium yang ditangani (345 uji laboratorium) dibagi Jumlah pemohon uji laboratorium (345 uji laboratorium) dibagi dengan Jumlah alat berat dalam kondisi baik (10 unit) / Jumlah alat berat (16 unit)

Capaian Kinerja Capaian Layanan Uji Laboratorium dan Alat Berat pada Tahun 2018 sudah sesuai target sebesar 81,25 %.

Sasaran strategis II Meningkatkan pelayanan sumber daya air

a. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Target Akhir renstra 2022	% Capaian 2018 terhadap target akhir 2022
				2017	2018		
1	Persentase ketersediaan sumber daya air	$((\text{Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik}/\text{jumlah panjang irigasi} \times 100\%) + (\text{jumlah luas areal yang dilayani irigasi}/\text{jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi} \times 100\%) + (\text{jumlah kelembagaan petani pengelola air yang diberdayakan}/\text{jumlah kelembagaan petani pengelola air yang seharusnya ada} \times 100\%) + (\text{Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik}/\text{jumlah panjang drainase} \times 100\%) + (\text{Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani}/\text{jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun)} \times 100\%)) / 5$	%	79,64	82,44	85,56	94.34

Tahun 2018 Angka realisasi diatas didapat dari :

Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik (341.073) dibagi jumlah panjang irigasi (446.791) ditambah jumlah luas areal yang dilayani irigasi (10,597) dibagi jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi (10,625) x 100 ditambah (jumlah kelembagaan petani pengelola air yang diberdayakan (200) dibagi jumlah kelembagaan petani pengelola air yang seharusnya ada (295) ditambah Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik (63.13) dibagi jumlah panjang drainase (119,45) x 100 ditambah Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani (448,392,130) dibagi jumlah kebutuhan air baku (450.449.669) x 100% dibagi 5

Capaian peningkatan pelayanan irigasi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 sebesar 82,44 % belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 80,87 %. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian peningkatan pelayanan irigasi adalah ketersediaan anggaran dalam memperbaiki sarana-sarana irigasi serta adanya kegiatan cetak sawah baru seluas 55 hektar .

Sasaran Strategis III Ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan yang memadai.

a. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Target Akhir renstra 2022	% Capaian 2018 terhadap target akhir 2022
				2017	2018		
1	Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik/jumlah gedung kantor x 100%	%	73,08	91,45	95.00	95,00

Tahun 2018 Sasaran tersebut dihitung menggunakan rumus : = (Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik ÷ Jumlah gedung kantor) x100%. Angka realisasi diatas didapat dari jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik yang berjumlah 93 gedung dibagi dengan Jumlah seluruh gedung kantor pemerintah yang berjumlah 104 gedung. sehingga dari rumus diatas didapat data realisasi kinerja untuk ketersediaan dan pelayanan infrastruktur gedung sebesar 100 %. Capaian Kinerja Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Kantor dalam kondisi baik di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 mencapai 91,45 % sudah sesuai dari yang ditargetkan sebesar 91,45 % Salah satu faktor terpenuhinya target kinerja sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik disebabkan karena kebutuhan untuk perbaikan gedung serta adanya skala prioritas pembangunan dan perbaikan gedung-gedung pemerintah dan didukung oleh ketersediaan anggaran.

b. Pembinaan dan Pengendalian Jasa Konstruksi

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Target Akhir renstra 2022	% Capaian 2018 terhadap target akhir 2022
				2017	2018		
1	Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi	Jumlah badan usaha konstruksi yang memenuhi ketentuan/jumlah badan usaha konstruksi x 100 %	%	74,58	74,58	74,58	100

Tahun 2018 Angka tersebut berasal dari : (Jumlah badan usaha yang memenuhi ketentuan 179 dibagi Jumlah badan usaha konstruksi keseluruhan 240) x 100 %

Capaian Kinerja Peningkatan Jasa Konstruksi Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 sudah memenuhi target yaitu 74,58 %. Salah satu penentu keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah pengelolaan jasa konstruksi. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di lapangan maupun wawancara dengan *stakeholders* terkait, sampai saat ini pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pusat dan daerah belum maksimal sehubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di daerah maupun keterbatasan anggaran pengelolaan untuk jasa infrastruktur

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya penataan lingkungan permukiman dan perkotaan

a. Program Pembangunan Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Target Akhir renstra 2022	% Capaian 2018 terhadap target akhir 2022
				2017	2018		
1	Capaian layanan air bersih dan air limbah	$((\text{Jumlah rumah tangga berakses air bersih} / \text{Jumlah rumah tangga} \times 100\%) + (\text{Jumlah rumah tangga berakses air limbah} / \text{jumlah rumah tanggax}100\%)) / 2$	%	66,80	87,70	67,94	143,56

Tahun 2018 Angka realisasi didapat dari : $((\text{Jumlah rumah tangga berakses air bersih} 119.308 / \text{Jumlah rumah tangga berakses air limbah} 95,579 / \text{Jumlah rumah tangga} 118.756)) \times 100$. Capaian Kinerja Pengembangan Kinerja layanan air bersih dan Air Limbah pada tahun 2018 telah mencapai melebihi target yang telah ditetapkan 67,29 %, untuk itu capaian kinerja ini perlu dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Dengan adanya ketersediaan air bersih dan pengelolaan limbah yang baik maka dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo

b. Program Lingkungan Sehat Permukiman dan Pengembangan Perumahan

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Target Akhir renstra 2022	% Capaian 2018 terhadap target akhir 2022
				2017	2018		
1	Capaian peningkatan pelayanan perumahan dan peningkatan kawasan	$((\text{Jumlah rumah layak huni} / \text{jumlah seluruh rumah} \times 100\%) + (\text{Luas permukiman kumuh yang ditangani} / (\text{luas pemukiman kumuh yang seharusnya}))$	%	41,94	47,52	42,43	111,99

	lingkungan sehat permukiman	ditangani x 100%))/2					
--	-----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--

Tahun 2018 Angka realisasi didapat dari : (Jumlah rumah layak huni 101.903 dibagi Jumlah seluruh rumah(112738) dibagi Jumlah rumah 112.038 dibagi Jumlah kebutuhan rumah (jumlah KK) 119.343 dibagi Luas permukiman kumuh tertangani 13,644 dibagi Luas pemukiman kumuh 293,79. Capaian kinerja peningkatan pelayanan perumahan dan kawasan permukiman pada tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 42,01 %. Keberhasilan dalam capaian target yang telah ditetapkan dikarenakan pemerintah daerah Kulon Progo telah melaksanakan program pengembangan perumahan secara berkelanjutan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu pembangunan fasilitas lingkungan rusunawa dan pemberdayaan peningkatan infrastruktur oleh komunitas. Pada tahun 2018 kegiatan pendampingan perumahan swadaya di kelurahan/desa meliputi kegiatan fisik berupa peningkatan kualitas prasarana dan sarana lingkungan, dan bantuan perumahan swadaya melalui dana DAK dan BKK, dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang. Angka capaian peningkatan kawasan lingkungan sehat permukiman didapat dari kekurangan dalam menambah jumlah permukiman tidak kumuh di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Serta kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk tidak membangun bangunan di tempat kumuh seperti di bantaran sungai maupun membangun bangunan di sempadan jalan maupun perlintasan kereta api

c. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Target Akhir renstra 2022	% Capaian 2018 terhadap target akhir 2022
				2017	2018		
1	Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan	$\frac{(((\text{Jumlah panjang jalan perkotaan bertrottoar} / \text{Jumlah panjang jalan perkotaan}) \times 100\%) + (\text{Jumlah panjang jalan perkotaan berdrainase} / \text{Jumlah panjang jalan perkotaan}) \times 100\%)}{2}$	%	87,18	92,01	92,01	105,40

Tahun 2018 Angka realisasi didapat dari : (Panjang jalan bertrottoar di perkotaan 8.890 dibagi Panjang jalan berdrainase di perkotaan 8.890 dibagi panjang jalan di perkotaan (4 perkotaan) 8.890) x 100%. Dengan adanya Pembangunan Infrastruktur terutama di perkotaan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktifitas masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar

d. Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Target Akhir renstra 2022	% Capaian 2018 terhadap target akhir 2022
				2017	2018		
1	Capaian taman dalam kondisi baik, layanan persampahan	$((\text{Jumlah sampah yang tertangani}/\text{Jumlah produksi sampah} \times 100\%)+ (\text{Jumlah taman dalam kondisi baik} / \text{jumlah keseluruhan Taman} \times 100\%))/2$	%	67,45	68,14	80,83	84.30

Tahun 2018 Angka tersebut diperoleh dari : $(\text{Jumlah sampah yang tertangani} 91 \text{ dibagi Jumlah produksi sampah} 132 \text{ dibagi Jumlah taman dalam kondisi baik} 33 \text{ dibagi jumlah keseluruhan Taman} 49) \times 100\%)/2$. Capaian Kinerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kulon Progo mencapai 68.14 % sudah memenuhi target RPJM Daerah yang ditetapkan sebesar 68.14 %.. Dipandang perlu untuk memenuhi target pada tahun depan dengan penambahan sarana dan personil dalam urusan persampahan sehingga dapat mengimbangi luas wilayah di Kabupaten Kulon Progo. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pada layanan persampahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, terdapat kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dilaksanakan pengoprasian TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan IPLT serta terlaksananya 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) di TPA. terlaksananya operasional mobil tinja, dan pemeliharaan sarana air lindi di TPA Banyuroto. Serta dilaksanakannya pemeliharaan kebersihan kota dengan tenaga kuliari berjumlah 50 orang dengan pemeliharaan sarana Container sebanyak 4 unit

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2018, didukung dengan anggaran yang direncanakan sejumlah Rp. 151.492.267.625 , realisasi sebesar Rp 146.647.504.856,35 atau sebesar 96,80% Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Program Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	347.299.850,00	345.302.554,00	99,42
	a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	145.935.250,00	145.804.200,00	99,91
	b. Penyediaan Jasa Keuangan	65.209.000,00	65.209.000,00	100,00
	c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	136.155.600,00	134.289.354,00	98,62
2.	Program Peningkatan Sarana /Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	2.653.923.315,00	2.409.853.418,00	90,80
	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	565.450.000,00	374.670.000,00	66,26
	b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	2.088.473.315,00	2.035.183.418,00	97,44
3.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	76.929.100,00	76.033.100,00	98,83
	a. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	34.739.500,00	34.245.900,00	98,57
	b. Penyusunan Laporan Keuangan	27.809.000,00	27.808.800,00	99,99
	c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	14.380.600,00	13.978.400,00	97,20
4.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	100.062.142.665,00	96.778.450.836,00	96,71
	a. Pemeliharaan Berkala jalan Kabupaten	11.112.648.900,00	10.907.851.993,00	98,15
	b. Peningkatan Jalan Kabupaten	72.431.821.350,00	70.933.249.650	97,93

No.	Program Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	c. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	5.119.171.150,00	4.982.851.150,00	97,33
	d. Pembangunan Jalan Kabupaten	3.152.053.250,00	2.168.594.000,00	68,79
	e. Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	789.043.000,00	769.460.000,00	97,51
	f. Pembangunan Jembatan Kabupaten	4.127.426.750,00	4.112.731.425,00	99,64
	g. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	3.329.978.265,00	3.318.765.946,00	99,66
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	269.515.000,00	269.450.500,00	99,97
	a. Pengujian Laboratorium	92.871.700,00	92.871.700,00	100,00
	b. Rehabilitasi dan Pelayanan Alat Berat	176.643.300,00	176.578.800,00	99,96
6.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air	23.332.556.506,00	22.796.066.000,00	97,70
	a. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	842.007.800,00	835.619.530,00	99,24
	b. Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	7.301.713.750,00	6.963.730.606,00	95,37
	c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	789.999.982,00	780.979.700,00	98,86
	d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	11.151.827.024,00	11.035.803.645,00	98,95
	e. Pengelolaan Jaringan Irigasi	1.223.999.900,00	1.210.999.700,00	98,93
	f. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	1.972.008.050,00	1.917.932.819,00	97,25
	g. Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Irigasi	51.000.000,00	51.000.000,00	100
7.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkantoran dan Perkantoran	15.995.764.000,00	15.282.040.650,00	95,53
	a. Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.311.131.000,00	13.297.022.400,00	99,89
	b. Pembinaan dan Pengawasan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	70.505.000,00	70.092.800,00	99,41
	c. Pembinaan Jasa Konstruksi	129.293.000,00	121.043.000,00	93,61
	d. Pengembangan Kota	2.493.835.000,00	1.793.882.450,00	71,93
8.	Program Pembangunan Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi	1.009.383.941,00	990.430.874,00	98,12
	a. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar	281.265.000,00	275.020.950,00	97,78

No.	Program Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	b. Penyediaan Sarana Air Bersih	728.118.941,00	715.409.924,00	98,25
9.	Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	3.702.030.448,00	3.684.335.690,00	99,52
	a. Pemeliharaan Kebersihan Kota	532.783.500,00	530.154.000,00	99,50
	b. Pengelolaan Persampahan	1.928.674.248,00	1.918.933.090,00	99,49
	c. Pembangunan dan Pengelolaan Taman	1.240.572.700,00	1.235.248.600,00	99,57

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran, meskipun dengan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dan Sarana Prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo semua target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik

3.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam Bidang Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo setiap tahun menghadapi beberapa permasalahan baik eksternal maupun internal. secara umum permasalahan ada di setiap bidang, baik bina marga, bidang cipta karya, bidang pengairan dan bidang perumahan permukiman

3.3.1 Permasalahan

- a) Secara umum kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang berkontur dataran rendah dan tinggi sangat mempengaruhi percepatan dalam pembangunan infrastruktur daerah.
- b) Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur tidak selesai sesuai dengan kontrak waktu yang telah dijadwalkan.
- c) Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur daerah dan minimnya jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki toleh pengampu masalah pekerjaan umum yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo.
- d) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat infrastruktur/ fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah.

- e) Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya.
- f) Meningkatnya perubahan peruntukan pemanfaatan lahan akibat dampak terkait pembangunan infrastruktur diantaranya pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta, pasir besi dan Bandara baru NYIA Kulon Progo.
- g) Belum lengkapnya regulasi penataan ruang berupa RDTR kawasan perkotaan dan RTR kawasan strategis (Peraturan Daerah).

3.3.2 . Solusi

- a) Pembangunan yang tidak selesai tepat waktu, diusulkan untuk dilanjutkan melalui anggaran perubahan tahun berikutnya.
- b) Terkait keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan SDM melalui diklat dan pelatihan serta penambahan SDM.
- c) Untuk menumbuhkan rasa sikap kepedulian masyarakat terhadap fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah maka perlu ditanamkan rasa memiliki terhadap daerahnya kepada masyarakat.
- d) Penanganan sampah melibatkan komunitas masyarakat, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang ditangani pemerintah daerah.
- e) Meningkatkan koordinasi penataan ruang dan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), pelayanan perijinan IMB dan penegakan hukum pemanfaatan ruang.
- f) Meningkatkan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengendalian dalam pelaksanaan rencana struktur dan pola ruang;
- g) Percepatan penyusunan regulasi penataan ruang berupa RDTR kawasan perkotaan dan PTR kawasan strategis

3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber

daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo didukung oleh 109 pegawai dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Data sumber daya manusia aparatur dan sarpras dilihat ditabel dibawah ini

Tabel 5. Jumlah Pegawai DPUPKP Kabupaten Kulon Progo Menurut Pendidikan Tahun 2018

a) Jumlah Pegawai

No.	SKPD	Jumlah Pegawai (orang)
1.	DPUPKP	109
	Jumlah	109

b) Pendidikan

No	SKPD	Kualifikasi Pendidikan (orang)					
		SD	SLTP	SLTA	Diploma	DIV/S1	S2
1	DPUPKP	6	19	43	8	24	9
	Jumlah	109					

c) Pangkat dan Golongan

No	SKPD	Pangkat/Gol (orang)			
		I	II	III	IV
1	DPUPKP	7	45	50	7
	Jumlah	109			

d) Pejabat Struktural/ Fungsional

No	SKPD	Struktural			JFU	JFT
		II	III	IV		
1	DPUPKP	1	5	18	85	0
	Jumlah	109				

Sumber data : Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi SDM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo di dominasi oleh kualifikasi pendidikan SLTA 43 orang kemudian diikuti oleh pendidikan S1 24 orang pendidikan SLTP 19 orang Pendidikan D I/II/III 8 Orang pendidikan SD 6 orang ,

pendidikan S II/III 9 orang . Jika dibandingkan dengan analisis jabatan /anjab maka kebutuhan SDM sangat kurang dibanding dengan kondisi riil yang ada.

3.5. Analisis Efisiensi Keuangan

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia didalamnya. Upaya upaya efisiensi anggaran pada Dinas PUPKP adalah dengan menggunakan standar harga yang telah ditetapkan, meminimumkan pagu lelang dan penetapan pemenang lelang dengan harga penawaran terendah. Selain itu pada kegiatan Perjalanan dinas luar daerah diselenggarakan sesuai kebutuhan dan undangan yang ada.

3.6. Kondisi Kondisi sarana dan prasarana

Sarana pada dasarnya berbentuk fasilitas atau alat yang digunakan secara langsung untuk kelangsungan suatu kegiatan. Biasanya, alat atau fasilitas ini mempunyai peran penting, karena tanpanya, kegiatan tersebut tidak akan dapat terselenggara dengan baik. Bahkan, kegiatan tidak akan ada tanpa adanya alat tersebut. Namun, ada satu hal yang juga termasuk dalam bentuk lain dari sarana. Untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan sasaran dan Indikator Kinerja utama pada Dinas PUPKP diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas PUP-KP dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6
Kondisi sarana dan prasarana Dinas PUP-KP tahun 2018

No	Uraian Jenis Aset	2017			2018		
		Jmlh (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%	Jmlh (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
1	Gedung Kantor	4	4	100.00	4	4	100.00
2	Alat-alat laboratorium	27	27	100.00	27	27	100.00
3	Alat-alat bengkel & ukur	85	85	100.00	85	85	100.00
4	Alat-alat berat :						
	b. Bulldozer (Barata MTD 110)	1	1	100.00	1	1	100.00
	c. Stom walls (Barata MV 6 P)	12	8	66.67	12	8	66.67
	d. Stom walls (Barata MGBI 2,5P)	3	2	66.67	3	2	66.67

No	Uraian Jenis Aset	2017			2018		
		Jmlh (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%	Jmlh (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
	e. Vibration Roller (Bomag 1,5 Ton)	1	0	-	1	0	-
	g. Vibration Roller (Bomag 2,5 Ton)	1	1	100.00	1	1	100.00
	h. Vibration Roller (Kubota MRH 600D)	1	1	100.00	1	1	100.00
	l. Diesel Air	1	1	100.00	1	1	100.00
	m. Portable Water Pump	1	1	100.00	1	1	100.00
	n. Excavator	1	1	100.00	1	1	100.00
	1. Babr Roller				2	2	100
5	Alat-alat angkut :						
	a. Truck Tangki Air (isuzu NKR 71)	1	1	100.00	2	2	100.00
	b. Mobil Pick Up	7	6	85.71	7	6	85.71
	c. Dump Truck	4	4	100.00	4	3	75.00
	d. Mobil Mini Bus	2	2	100.00	2	2	100.00
	e. Mobil Truck (light truck TLD)	1	1	100.00	1	1	100.00
	f. Mobil Tinja	1	1	100.00	1	1	100.00
	g. Sepeda Motor	33	32	96.97	33	32	96.97
	i. Armroll Truck	3	3	100.00	3	3	100.00
	j. Jeep	2	2	100.00	2	2	100.00
6	Alat-alat lainnya						
	a. PC (personal computer)	19	14	73.68	19	15	78.95
	b. Mesin Ketik	13	12	92.31	13	12	92.31
	c. Laptop	4	3	75.00	4	4	100.00
	d. Ploter	1	1	100.00	1	1	100.00
	e. Printer	6	6	100.00	6	6	100.00
	f. Scanner	1	1	100.00	1	1	100.00
	g. Viewer LCD (proyektor)	2	3	100.00	4	5	100.00
	h. Sound system	1	1	100.00	1	1	100.00
	i. Faximili	2	2	100.00	2	2	100.00
	j. Almari Besi	14	14	100.00	14	14	100.00
	k. Filling Cabinet	48	48	100.00	48	48	100.00
	l. Almari kayu	43	43	100.00	43	43	100.00
	m. GPS	2	2		2	2	

No	Uraian Jenis Aset	2017			2018		
		Jmlh (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%	Jmlh (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
				100.00			100.00
	n. Theodolith	3	3	100.00	3	3	100.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi sarpras tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kondisi baik, hal sangat mendukung tercapainya program dan kegiatan sehingga kedepan diharapkan program dapat tercapai lebih meningkat ditahun sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman disamping merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) SK. LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, juga merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang pelaksanakannya disesuaikan dengan Dasar Anggaran Satuan Kerja termasuk dana Anggaran Tambahan (APBD – Perubahan) terdiri dari Program dan Kegiatan SKPD.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pegawai dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan seluruh Kabupaten Kulon Progo.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo :

1. Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan infrastruktur gedung-gedung pemerintah.
3. Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.
4. Meningkatkan jangkauan pelayanan sumber daya air
5. Meningkatkan kinerja perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kulon Progo
6. Meningkatkan pelayanan persampahan dan pertamanan

Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah sehingga tidak hanya wacana semata untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam pembangunan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*

Kepala Dinas,

Ir GUSDI HARTONO, MT
NIP. 19650806 199303 1004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo



